



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI NUSANTARA
(PENA) SEBAGAI SOLUSI PENGENTASAN
KEMISKINAN**

**DIREKTUR KABIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA,
KEPENDUDUKAN DAN KEBUDAYAAN**

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

JAKARTA, 16 OKTOBER 2024

Outline :

- Konsep Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim Indonesia
- Target dan Distribusi Kemiskinan berdasarkan Provinsi
- Kajian Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) sebagai Program Pemberdayaan
- Karakteristik KPM Penerima PENA
- Budaya Kewirausahaan
- Simpulan dan Rekomendasi
 - a. Model Pelaksanaan Pena (Bisnis Proses)
 - b. Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor (K/L) dalam Pelaksanaan PENA

KONSEP KEMISKINAN



Garis Kemiskinan
= Rp550.458/kapita/bulan

Tingkat Kemiskinan = 9,36%

- Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
- Penduduk dikategorikan sebagai **penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK) (BPS)**

- **Indikator Makro yang digunakan untuk memantau progress kemiskinan** adalah: *Persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin*
- **BPS menghitung angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem merujuk pada hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Bulan Maret dan September di tiap tahunnya**

KEMISKINAN EKSTREM

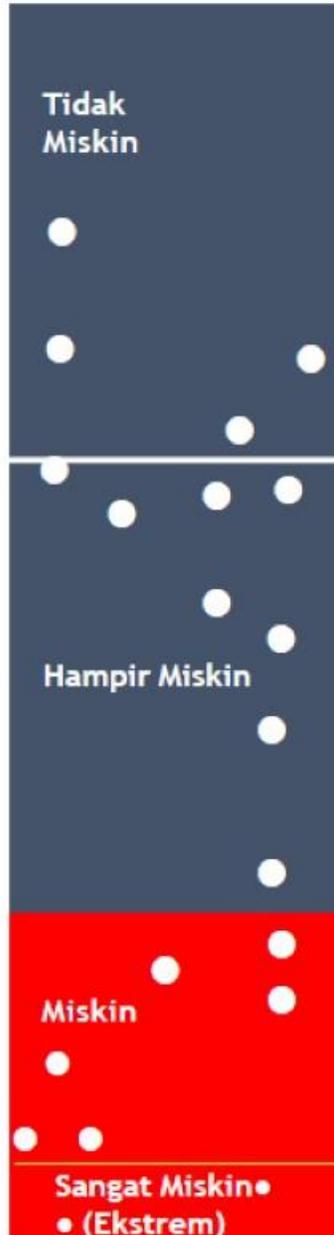


Garis Kemiskinan Ekstrem
US\$1,9/kapita/hari PPP = Rp11.571,21/kapita/hari
= Rp351.957,4/kapita/bulan

Tingkat Kemiskinan Ekstrem = 1,12%

- Fenomena kemiskinan ekstrem merupakan **persoalan multidimensi. Mereka terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar**: pendidikannya rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif dan berpendapatan rendah (UNDP).
- Penduduk dikategorikan miskin ekstrem jika rata-rata pendapatan dibawah 1,9 US\$ PPP

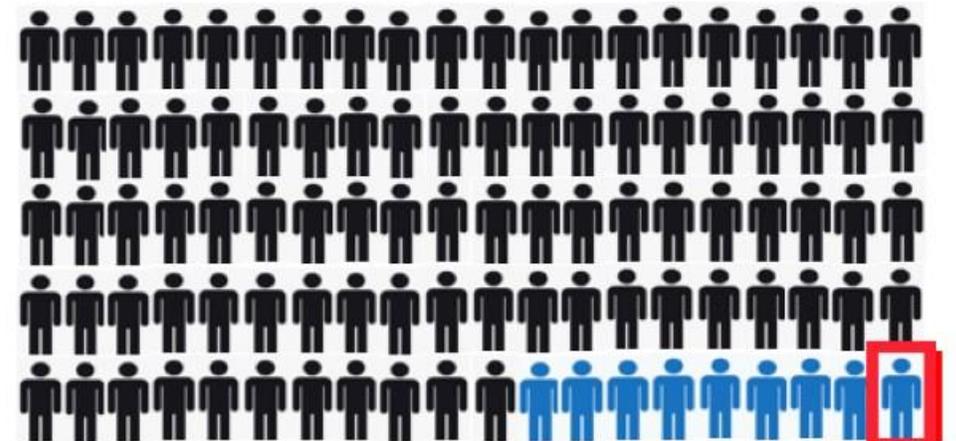
KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM



- Komposisi penduduk dilihat dari Tingkat kesejahteraan akan terkelompokkan menjadi tidak miskin-hampir miskin-miskin-dan miskin ekstrem;
- Indonesia menggunakan ukuran **absolut garis kemiskinan** untuk mengidentifikasi kemiskinan. *Garis kemiskinan (GK) merupakan nilai rupiah minimal untuk mencukupi kebutuhan dasar baik makanan dan nonmakanan yang dihitung oleh BPS dari data Susenas.*
- Penduduk yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan dikelompokkan sebagai **penduduk miskin**. Sementara penduduk yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan ekstrem dikelompokkan sebagai **penduduk miskin ekstrem**. Penduduk miskin ekstrem adalah bagian dari penduduk miskin

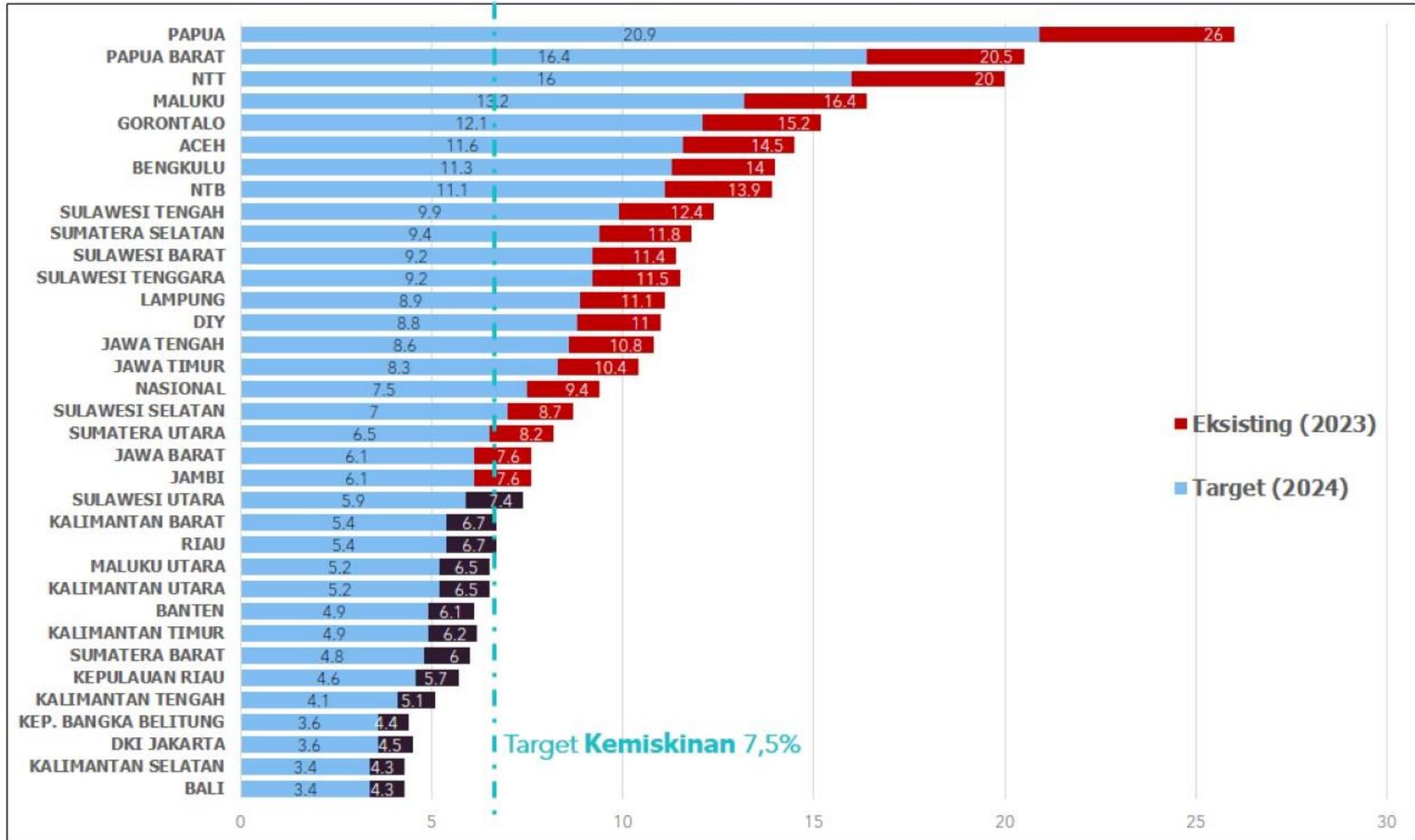
Pada Maret 2023, berdasar Rilis BPS:

- Diantara 100 penduduk didapati **9 orang miskin**
- **Diantara 9 orang tersebut 1 orang miskin ekstrem**



TARGET KEMISKINAN PROVINSI UNTUK MENCAPAI KEMISKINAN 7,5%

Tingkat Kemiskinan dan Target Kemiskinan (%)

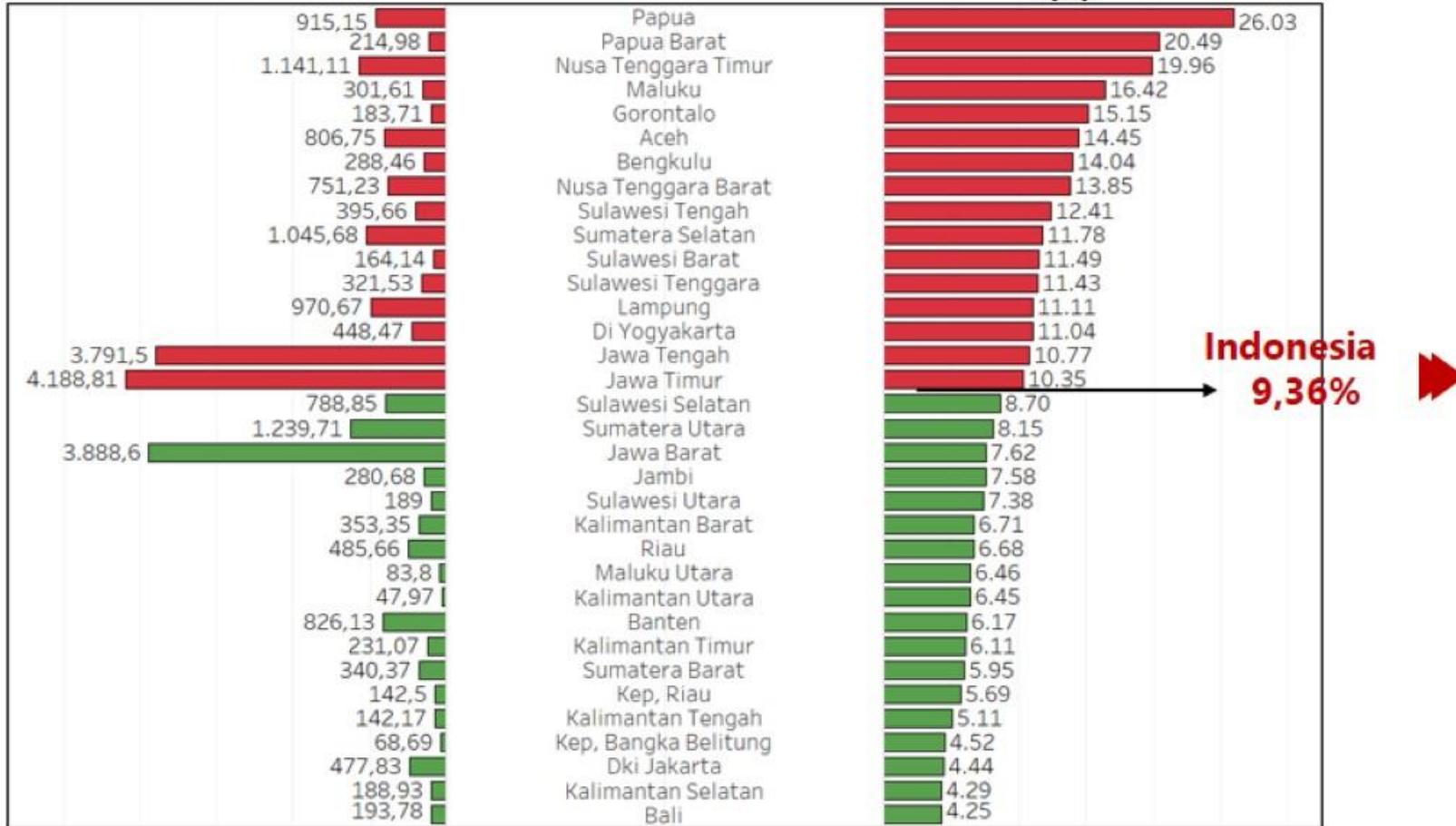


DISTRIBUSI KEMISKINAN MARET 2023 BERDASARKAN PROVINSI

Kondisi Penduduk Miskin, Maret 2023

Jumlah penduduk miskin
(ribu jiwa)

Persentase penduduk miskin
(%)



Provinsi-provinsi dengan **tingkat kemiskinan yang tinggi** didominasi oleh **provinsi di wilayah timur Indonesia**.

Ini menunjukkan adanya **variasi yang cukup signifikan** dalam **tingkat kemiskinan** di Indonesia.

18 provinsi di bawah persentase nasional perlu dianggap sebagai contoh kesuksesan dalam Upaya pengentasan kemiskinan.

16 provinsi di atas persentase nasional perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

TRANSFORMASI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kelompok Usaha Bersama (KUBe)
Tahun 1990 - 2020
Sasaran ; KPM PKH,
KPM Bantuan Pangan Non Tunai



Program Kewirausahaan Sosial (ProKus)
Tahun 2019- 2021
Sasaran ; KPM PKH – Graduasi
KPM PKH Persiapan Graduasi yang memiliki Rintisan Usaha



Pahlawan Ekonomi Nusantara Tahun 2020- 2021
Sasaran; KPM PKH, KPM Sembako, KPM Rumah sejahtera Terpadu, KPM Atensi, KPM Respon Kasus, dan penerima manfaat dari pusat kesejahteraan sosial yang terdapat dalam DTKS baik yang belum maupun yang sudah memiliki rintisan usaha



Program berfokus pada peningkatan pendapatan keluarga miskin dengan diberikan tambahan modal dan pendampingan, Program ini dinilai Kurangnya pendampingan. Serta pertimbangan bahwa Tusi Kemensos adalah memberikan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial. Pemberdayaan ekonomi menjadi ranahnya Kementerian lain.

Diolah dari data Kaji Cepat PRKP- BRIN 2022



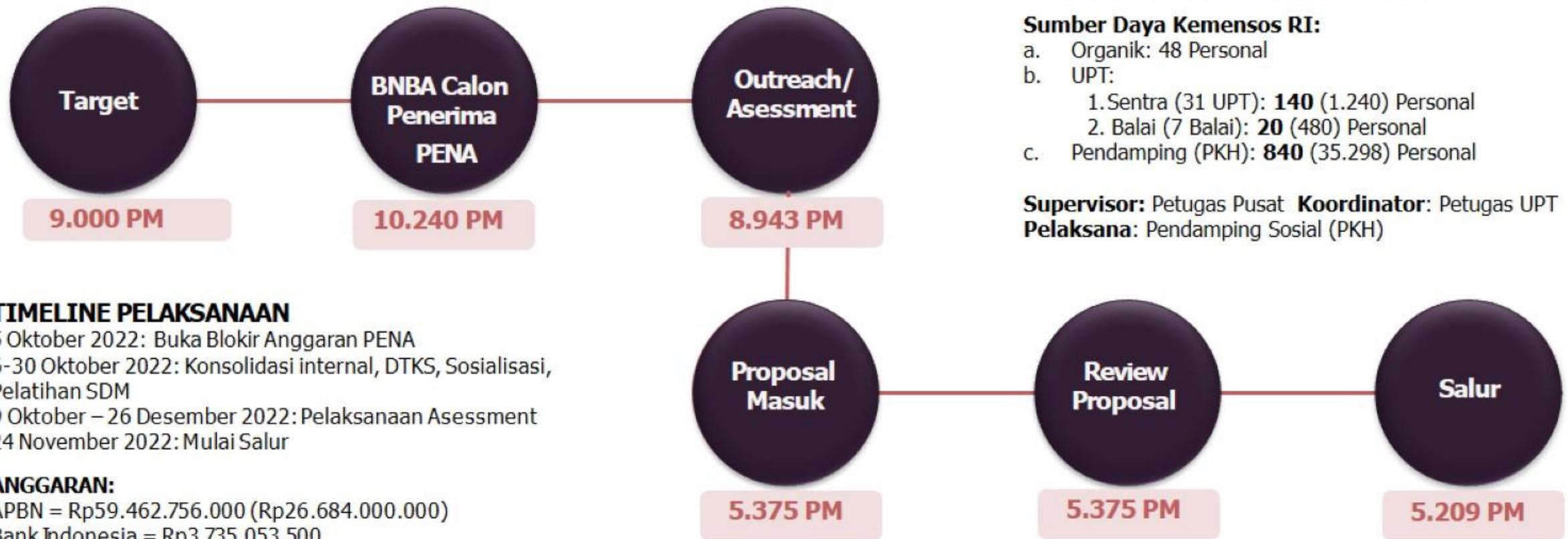
- Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) memadukan antara kegiatan ekonomi dan sosial.
- Konsep kewirausahaan sosial lebih menonjol pada kegiatan ekonomi. Sehingga hal ini akan menjadi potensi evaluasi balik bagi kemenkeu dan Bappenas.



Rintisan baru dari program Pahlawan Ekonomi di Surabaya. PENA merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan strategi peningkatan pendapatan, melalui peningkatan kemampuan berusaha, dengan pendekatan individu maupun komunitas dengan mengoptimalkan peran pendamping sosial sebagai fasilitator yang mempertemukan calon wirausaha dengan sistem sumber yakni para ahli wirausaha untuk mendorong KPM menjadi wirausaha pemula

PROSES, TAHAPAN DAN PENYALURAN PENA

Jumlah Bentuk bantuan
Bentuk peralatan usaha Rp. 5.500.000,-
Bentuk bahan baku/ Usaha Rp.500.000
Diserahkan langsung ke KPM PENA



SUMBER DAYA MANUSIA

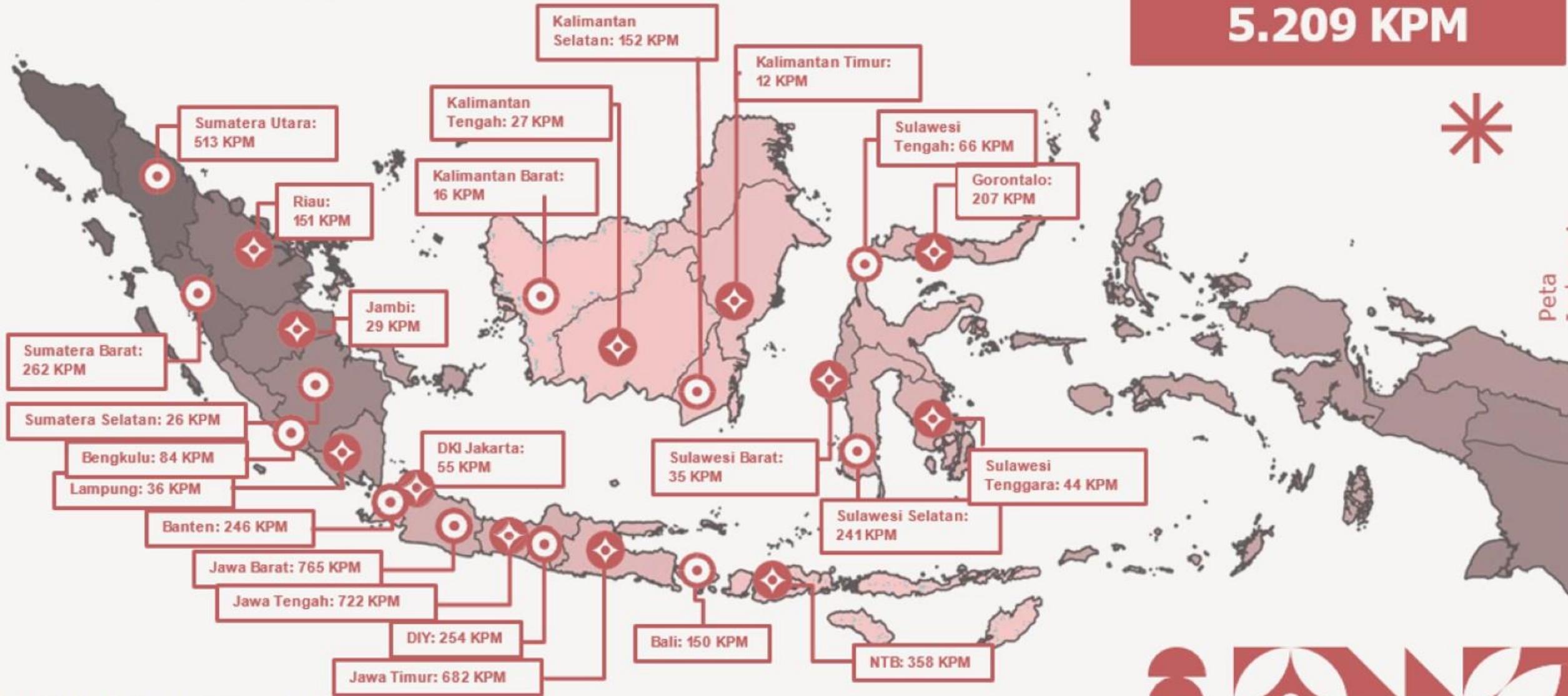
Sumber Daya Kemensos RI:

- a. Organik: 48 Personal
- b. UPT:
 - 1. Sentra (31 UPT): **140** (1.240) Personal
 - 2. Balai (7 Balai): **20** (480) Personal
- c. Pendamping (PKH): **840** (35.298) Personal

Supervisor: Petugas Pusat **Koordinator:** Petugas UPT
Pelaksana: Pendamping Sosial (PKH)

SEBARAN KPM PENERIMA BANSOS PENA TAHUN 2022

TOTAL PENERIMA PENA TA 2022
5.209 KPM



TUJUAN KAJIAN PENA



1

Mengidentifikasi kebijakan yang mendukung implementasi PENA sebagai program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan

2

Merekomendasikan model ideal pelaksanaan PENA

3

Merumuskan hasil kajian dalam bentuk rekomendasi kebijakan dari pelaksanaan PENA yang sedang bergulir, agar PENA dapat berjalan sebagai program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan

Banten

di Kabupaten Lebak dengan
Jumlah KPM PENA 128 :
Sampel (14) KPM

Jawa Barat

di Kabupaten Majalengka,
jumlah KPM PENA 275 : Sampel
(11) KPM

Jawa Timur

di Kabupaten Malang, Jumlah
KPM PENA sebanyak 208 KPM :
Sampel (21) KPM

Jawa Tengah

di Kabupaten Brebes dengan
Jumlah KPM PENA 49: Sampel (18) KPM

Sumatera Barat

di Kota Bukit Tinggi : Kajian
Budaya Kewirausahaan

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. STUDI LITERATUR
2. STUDI KUALITATIF
3. STUDI KUANTITATIF
4. STUDI LAPANGAN

Pengolahan Data:

Analisa Data KPM PENA, Analisa Pelaksanaan PENA, Analisa Gap, Analisa Dampak Awal

JUSTIFIKASI PEMILIHAN LOKASI KAJIAN

Berdasarkan Proporsi Kemiskinan yang ada dalam lokasi kajian

1

2

Ketersediaan data program PENA yang di dapat

3

Berdasarkan pada sebaran banyaknya KPM PENA yang ada di Pulau Jawa



KARAKTERISTIK KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PENA

Karakteristik KPM PENA berdasarkan dari 4 kabupaten yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Brebes, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Malang

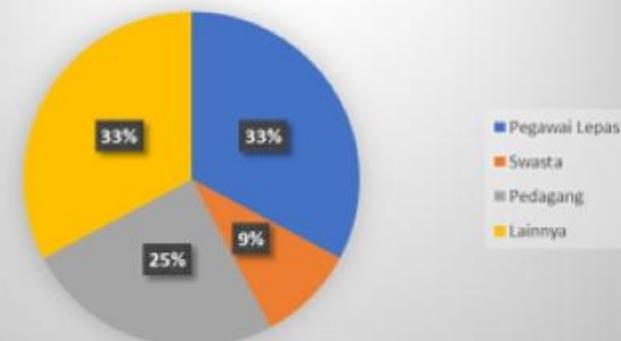
Sebaran Responden yang Ditemui



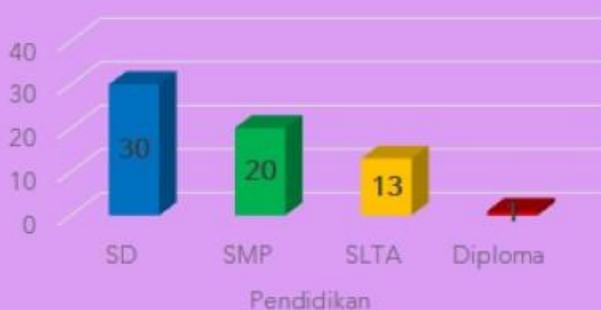
Jenis Kelamin Responden



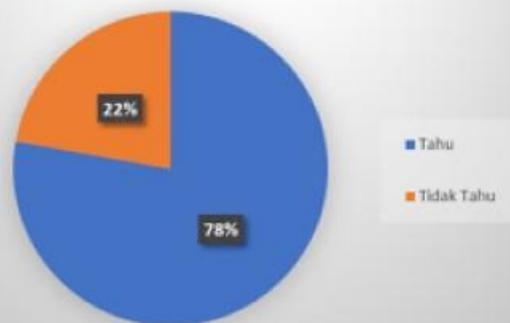
Pekerjaan Utama Kepala Keluarga



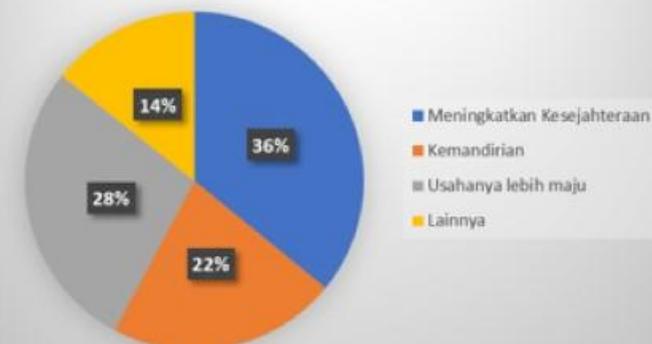
Tingkat Pendidikan Responden



Mengetahui Program PENA



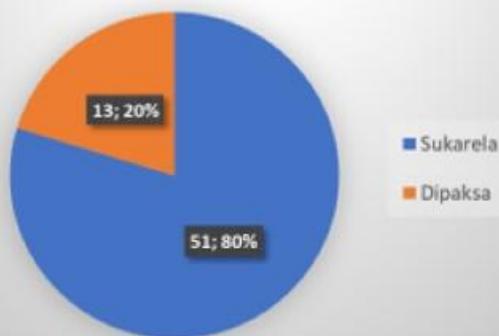
Harapan Ikut Program PENA



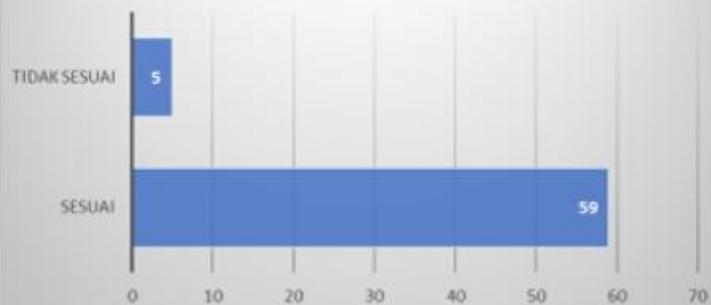
KARAKTERISTIK KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PENA

Karakteristik KPM PENA berdasarkan dari 4 kabupaten yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Brebes, Kabupaten Majalengka, dan kabupaten Malang

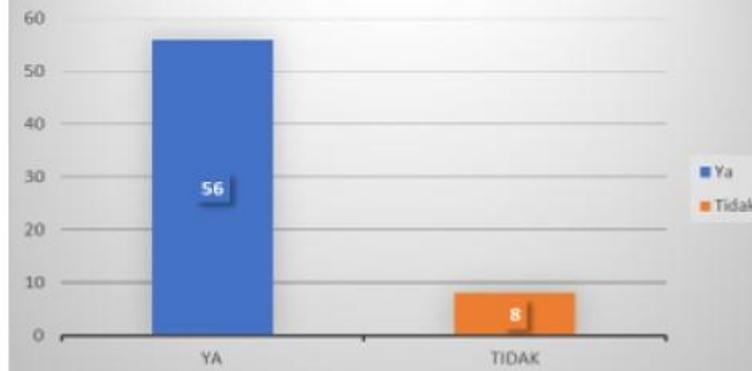
Keikutsertaan dalam Program PENA



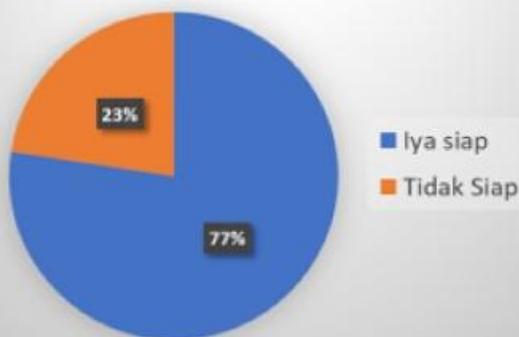
KESESUAIAN BANTUAN YANG DIBERIKAN



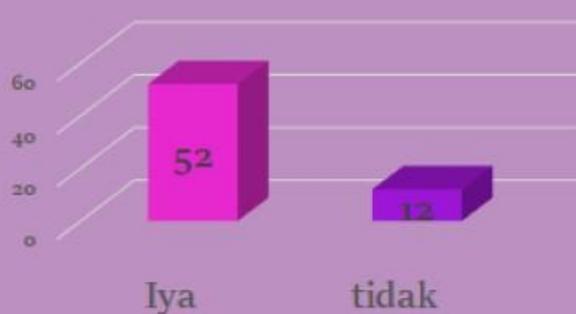
Keikutsertaan KPM dalam Pelatihan Kewirausahaan



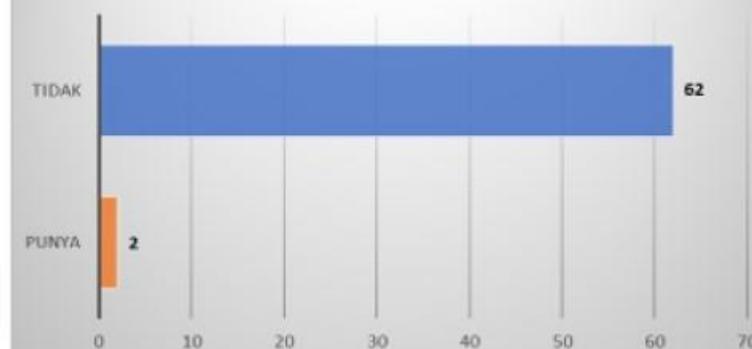
Kesiapan Menerima Graduasi



Kepemilikan Usaha Rintisan



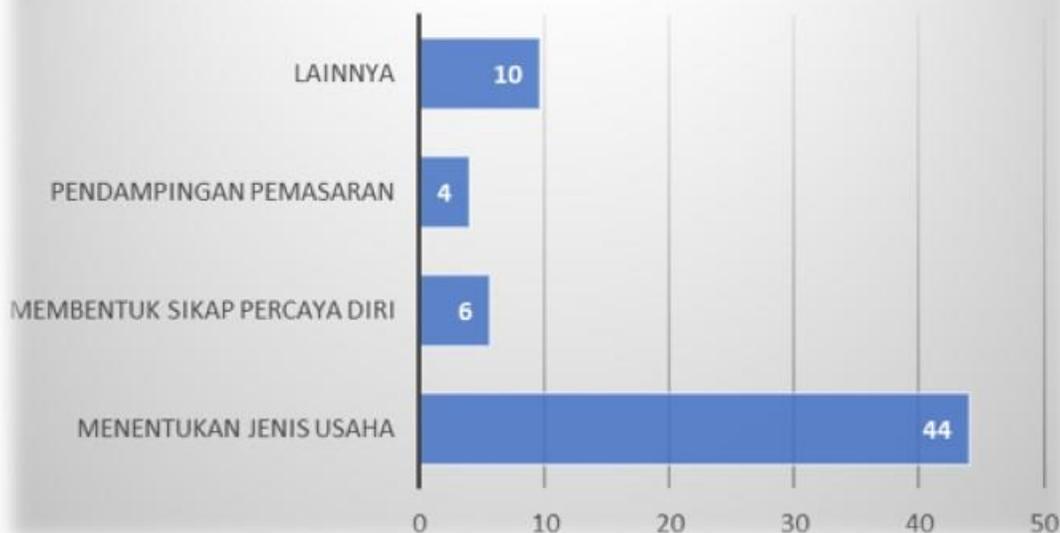
Kepemilikan ijin Usaha



KARAKTERISTIK KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PENA

Karakteristik KPM PENA berdasarkan dari 4 kabupaten yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Brebes, Kabupaten Majalengka, dan kabupaten Malang

Bentuk Bimbingan yang Diberikan Pendamping



Frekuensi Bimbingan dari Pendamping



Gambaran Pelaksanaan Program PENA (di 4 Lokasi)



- 1** PENA di Kabupaten Malang mendapatkan bantuan dari CSR BUMN- Bank Indonesia (BI), kepada Kementerian Sosial. Bantuan **hanya menyediakan budget anggaran yang diberikan ke KPM, bantuan ini belum dianggap sebagai sebuah pemberdayaan.**
- 2** Dinas Sosial Kabupaten Majalengka melibatkan diri secara aktif dalam program PENA, memantau proses pelaksanaan PENA (persiapan, verifikasi data, penggantian peserta, penyusunan proposal sampai pembagian bantuan). Pemda juga mengusulkan nama KPM PENA sebanyak 400 KPM ke Kementerian Sosial meskipun yang diakomodir hanya 25 KPM.
- 3** Pemda Majalengka Untuk memastikan kinerja pendamping Kabupaten Majalengka melakukan penandatanganan capaian kinerja kepada para Pendamping. Karena Pemda juga berkontribusi terhadap tingkat kesejahteraan pendamping dengan memberikan insentif sebesar 300 ribu per pendamping dengan jumlah 215 pendamping
- 4** Kesesuaian barang yang diberikan telah sesuai dengan usulan, namun penetapan kebutuhan perlu assessment lebih detail.
- 5** Penetapan KPM PENA telah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). namun BNBA yang diberikan oleh Kementerian Sosial belum sepenuhnya mengakomodir usulan Pemda.
- 6** Akibat Pelaksanaan PENA atau kewirausahaan sosial dilaksanakan di akhir tahun, sehingga tahapan pemberdayaan tidak bisa dilaksanakan maksimal.
- 7** Masih ditemukan KPM PENA yang tidak siap Gradusi meskipun KPM sudah menandatangani kesediaan Graduasi

Hasil Verifikasi Program PENA di 4 Lokasi



No	Poin-poin yang Dievaluasi	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Seleksi calon penerima manfaat	√		Usulan Peserta dari Pusat Masih ada KPM bukan penerima program bansos, atensi, RST Pendamping melakukan verifikasi data dan usulan pengganti, serta pendataan kebutuhan usaha
2	Penerima manfaat	√		Sesuai dengan DTKS
3	Kesesuaian Penentuan Jenis Bantuan yang diusulkan	√		Penentuan Jenis bantuan barang mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia, tidak berdasar kebutuhan mendesak usaha. Penentuan jenis usaha- lebih banyak berdagang makanan dan produksi makanan kecil yang sulit dikembangkan.
4	Kesesuaian jenis bantuan yang diterima	√		Telah sesuai jenis barang yang diusulkan dengan yang diterima. Untuk belanja bahan sampai bulan Mei belum diterima
5	Sosialisasi Kepada Pemda	√		Sosialisasi dan koordinasi dilakukan di awal kegiatan terkait rencana program. meskipun penentuan peserta dikembalikan ke Pusat. Untuk tahapan selanjutnya koordinasi tidak berjalan.
6	Sosialisasi dari Sentra Terpadu Pelayanan Sosial	√		Dari UPT Kementerian Sosial
7	Sosialisasi kepada calon KPM	√		Sosialisasi kegiatan sekaligus pengusulan data penetapan awal ke Kemensos

Hasil Verifikasi Program PENA di 4 Lokasi



No	Poin-poin yang Dievaluasi	Kesesuaian		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
8	Pengalaman Pendamping dalam wirausaha	√		48.3% pendamping tidak punya pengalaman dan 21.7% punya pengalaman 1-2 tahun.
9	Model Pendampingan Inkubasi, one to one, partisipasi Kelompok		√	Tidak dilakukan pendampingan Pendamping PKH hanya membantu penyusunan proposal kebutuhan usaha. Pendamping PKH sudah memiliki tugas dan beban kerja padat
10	Peningkatan Kapasitas Pendamping Program		√	Tidak dilakukan peningkatan Kapasitas/ pelatihan bagi Pendamping
11	Peningkatan Kapasitas calon KPM		√	Tidak dilakukan pelatihan kewirausahaan bagi KPM
12	Koordinasi dengan Pemda		√	Hanya Kab Majalengka saja yang melakukan koordinasi secara intensif. Dilakukan koordinasi di awal kegiatan
13	Adanya keterlibatan Lembaga kewirausahaan		√	Belum ada. Hanya di Malang Raya mendapatkan bantuan pendanaan dari CSR
14	Mitra usaha		√	Belum ada
15	Lembaga Pembiayaan		√	Belum Terhubung
16	Lembaga Pelatihan		√	Belum melaksanakan pelatihan
17	Waktu Pelaksanaan		√	2-3 bulan pelaksanaan, sampai bantuan diberikan.

Budaya Kewirausahaan

Sumatera Barat:

- Orang Minangkabau wirausahawan sektor perdagangan;
- Tradisi berdagang seiring dengan merantau: Merantau untuk berdagang;
- Pemecahan masalah pertanian dengan berdagang dengan cara merantau;
- Keterampilan berdagang diperoleh dari kerabat.
- Perempuan-perempuan Minangkabau juga wirausahawan;
- Matrilinealisme sumber struktural kewirausahaan perempuan Minangkabau;
- Perempuan didorong oleh masyarakat untuk terlibat aktif dalam ekonomi rumah tangga;
- Suami tidak penanggung jawab ekonomi rumah tangga: mereka membantu isteri.

Contoh Budaya Wirausaha

Kelompok/ Entitas	Usaha Tradisional
Orang Minang (Padang)	Warung Padang
Orang Tegal	Warung Tegal
Orang Lamongan	Pecel dan Penyet
Orang Garut/ Tasik	Cukur Rambut dan Kreditan
Orang Bugis	Kanvasan



SIMPULAN

Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan ekonomi merupakan program strategis untuk mengentaskan kemiskinan yang dijalankan melalui kegiatan berwirausaha

Program PENA yang berjalan di tahun 2022 ini masih perlu Penyempurnaan mekanisme dan implementasi pelaksanaan.
(Usulan Penyempurnaan Proses Bisnis)

1

Dalam Program PENA (bisnis proses PENA) Perlunya mekanisme Koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan lainnya

2

Agar usaha KPM PENA ini berhasil untuk mencapai graduasi, maka proses pemberdayaan ini perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kesiapan KPM, baik dari sisi keluarga, motivasi usaha, serta kondisi ekonomi para KPM PENA

3

REKOMENDASI KEBIJAKAN

**Mengusulkan
model
pelaksanaan
program PENA
(bisnis proses)
untuk
meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat**

1

- 1. Integrasi Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;**
- 2. Pendampingan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat;** pendampingan oleh pendamping yang memiliki kompetensi kewirausahaan. Untuk pendamping Sosial dapat melekat pada incubator sekaligus proses *learning by doing*
- 3. Mengimplementasikan Proses Usulan peserta PENA bersifat *button up***
- 4. Menjadikan lembaga incubator, PT, Lembaga Wirausaha, Badan Usaha, K/L sebagai bagian dari pelaksanaan program PENA.** Lembaga ini melakukan pengembangan bisnis mulai dari assessment, pembinaan, pelatihan, pendampingan, akses pengembangan usaha dengan SDM handal.
- 5. Mempertimbangkan Jumlah nominal modal barang yang diberikan kepada KPM PENA** dan tidak mesti sama antara usaha satu dengan yang lainnya. Pemberian barang berdasarkan kebutuhan yang sesuai jenis usaha
- 6. Menuntaskan bantuan belanja bahan usaha yang masih belum diberikan ke KPM PENA sebesar Rp. 500.000,-**
- 7. Sosialisasi dan informasi penandatanganan kesediaan graduasi harus dipahami KPM,** dan KPM bersedia graduasi dengan penuh kesadaran serta tidak ada keluhan keberatan setelahnya.
- 8. Perlu adanya alternatif kebijakan pemberdayaan Masyarakat yang diberikan oleh pemerintah,** PENA bukan satu satunya pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang berkelanjutan. Proses assessment KPM akan memperlihatkan peminatan terhadap calon KPM PENA agar mendapatkan pemberdayaan yang tepat.
- 9. Perlu dilakukannya penyesuaian nama program kewirausahaan "Pahlawan Ekonomi Nusantara" (PENA),** menjadi nama yang memberikan identitas program. Misalnya "Masyarakat Maju Dengan Berwirausaha"; "Kewirausahaan untuk rakyat" dll.
- 10. Pemerintah Pusat & Daerah memastikan program PENA dapat berjalan berkelanjutan**
- 11. Mempertimbangkan pelaksanaan KPM PENA pada lokasi yang memiliki budaya kewirausahaan**

MODEL PELAKSANAAN PENNA (BISNIS PROSES)

PENGUSULAN CALON PM

1. Ditjen Dayasos, KPM Prog. Sembako
2. Ditjen Linjamsos, KPM PKH, KPM RST
3. Ditjen Rehsos, KPM Atensi dan Permakanan
4. Command Center, KPM Pasca Respon Kasus
5. Puskesmas, Pengaduan masyarakat

Inventarisir usulan

Direktorat Kewirausahaan Sosial

DTKS

Penetapan Inkubator/PT/Lembaga Pelatihan Kewirausahaan/K/L terkait

Pengusulan calon PM dari Pendamping sosial & Dinsos

Pengusulan calon Expert/Mentor Pemerintah/daerah/KL

Pengusulan Inkubator/PT/Lembaga Wirausaha

Persiapan

Kemenaker & Lainnya MoU Kemensos

Lapangan pekerjaan

Asesmen cek kelayakan (lembaga, yang ditunjuk, pendamping & dinsos)

Penetapan KPM

Inkubator, / PT, / Lembaga Pelatihan / Badan Usaha / K/L terkait (Pendampingan):

- Penguatan motivasi
- Pelatihan umum
- Skill up khusus
- Pemantauan progress

Pemetaan

- Lokasi
- Penerima manfaat
- Pendamping sosial.
- Pelatih ahli (pengusaha lokal/expert/mento

Penyusunan proposal: -pendampingan -pemilihan jenis usaha

Proses

Modifikasi dari Juknis PENNA 197/HK.01/9/2022

Pelatihan KPM:

- bahan baku
- peralatan produksi
- paker packaging

FASILITASI

- Perluasan usaha/akses pasar
- Ikut serta event/expo
- Perijinan

K/L Terkait

Dinas Terkait

RUJUKAN

- Akses lembaga permodalan/ pembiayaan
- Koperasi
- Dinas Perindustrian
- Dinas Perdagangan

Keterangan:

- Kemensos
- Pemda /pendamping Kementerian/Lembaga Lainnya
- Inkubator/PT/Lembaga Pelatihan Swasta

Pelaksanaan

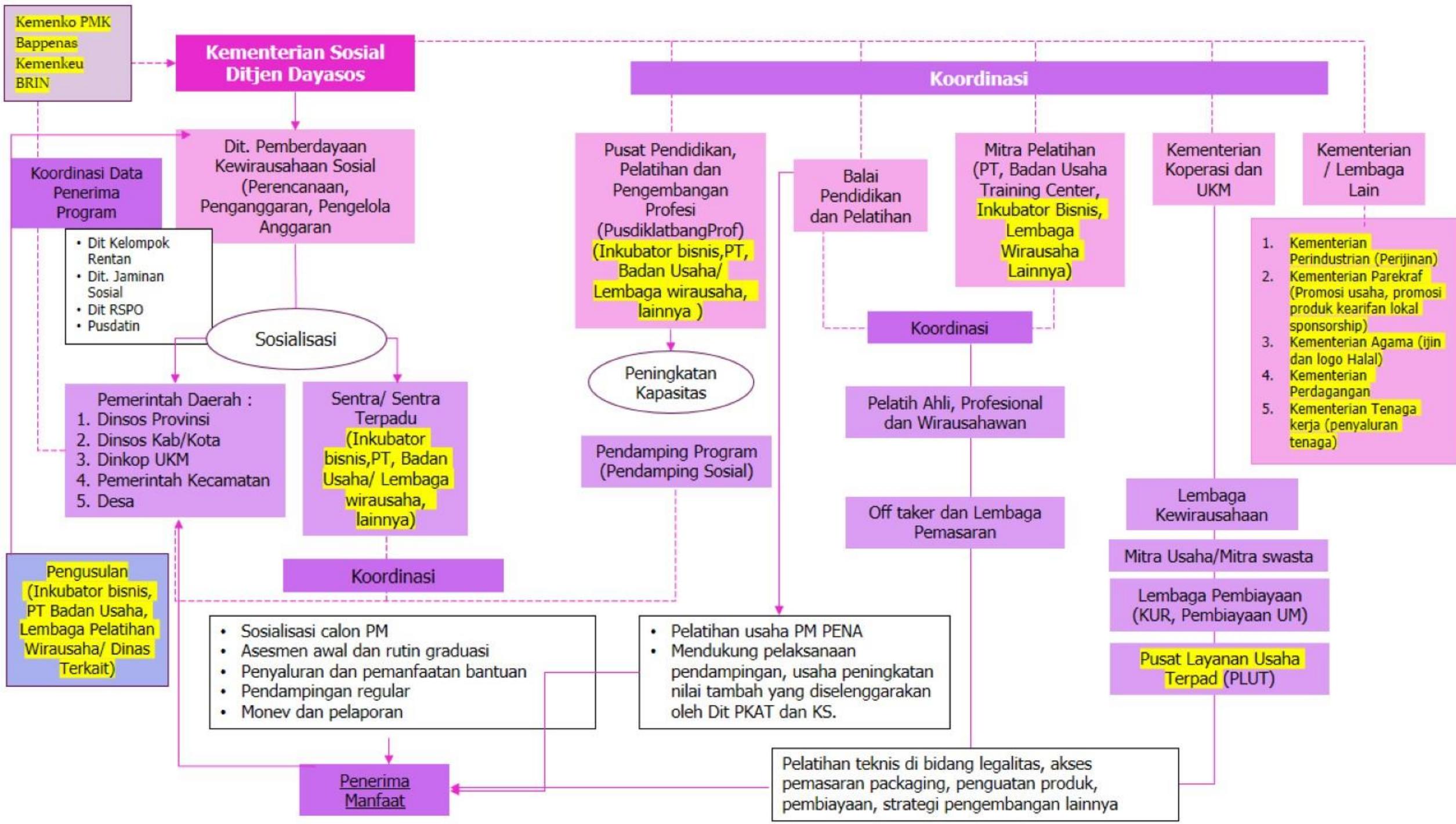
Monev : (1) Kemensos (Pusat, Sentra & Balai/KL lain) (2) Komunitas/ masyarakat/ lembaga lainnya/paguyuban (3) BRIN (4) Kemenko PMK (5) BAPPENAS (6) Kemenkeu

REKOMENDASI KEBIJAKAN

**Mengusulkan
Mekanisme
Koordinasi
Kementerian
Lembaga dalam
Pelaksanaan
Program PENA**

2

- **Perlu adanya komitmen dan dukungan lintas K/L** atas ketepatan waktu pelaksanaan PENA. hal ini untuk memastikan agar semua tahapan Program PENA mulai assessment, pelatihan, pendampingan dapat diterapkan dengan baik.
- **Perlu dikeluarkannya Permensos** untuk mengakomodir Daerah yang bisa ditindaklanjuti melalui Perbub/Perwal atau bahkan Perda, hal ini sebagai dasar untuk penguatan koordinasi lintas OPD sekaligus perencanaan dan penganggaran dari APBD. Penganggaran bisa diprioritaskan juga untuk pendampingan agar program berkelanjutan
- **Tahapan Pengembangan PENA;** Pemberdayaan kepada KPM PENA dilakukan secara bertahap mulai dari *Pre star up, Star up, Survival, Growth, Matang*. Untuk proses ini perlu adanya koordinasi dan Kerjasama dengan lintas Lembaga atau OPD setempat
- **Penguatan Ekosistem Kewirausahaan;** dalam bentuk dukungan budaya, kebijakan, SDM, keuangan, dan berbagai dukungan kelembagaan dan infrastruktur. Seperti Penjual, pembeli, ketersediaan bahan, ketersediaan pasar, akses keuangan dan permodalan, akses produksi, pelatihan, kemudahan perizinan, akses pembinaan, pemasaran, sehingga usaha mereka dapat berkembang dan berkelanjutan.
- **Kepastian Keberlanjutan Program PENA;** Koordinasi, MoU, Monev dan Surat Keputusan Bersama (SKB)





TAHAPAN PENGEMBANGAN KPM

Calon Wirausaha (tahun 1)

- KPM mau memulai usaha atau bermimpi usaha
- KPM Masih mendapatkan program PKH dan bantuan KIS, KIP, Sembako
- Apabila hasil asesmen menunjukkan tahap ini maka proses pemberdayaan dilakukan selama 3 tahun

Wirausaha Pemula (tahun 2)

- KPM sudah memulai usaha,
- KPM masih menerima program PKH dan bantuan KIS, KIP, Sembako. Namun sudah siap graduasi
- Apabila hasil asesmen menunjukkan tahap ini maka proses pemberdayaan dilakukan selama 2 tahun

Wirausaha Mapan (tahun 3)

- Usaha KPM mulai memiliki strategi yang terarah dan sudah mulai membimbing
- KPM lain untuk menjadi wirausaha dan mempekerjakan KPM
- Apabila hasil asesmen menunjukkan tahap ini maka proses pemberdayaan dilakukan selama 1 tahun

DOKUMENTASI KEGIATAN



KPM PENA DI LEBAK - BANTEN



KPM PENA DI MAJALENGKA – JAWA BARAT



KPM PENA DI MALANG – JAWA TIMUR



KPM PENA DI BREBES – JAWA TENGAH



DOKUMENTASI KEGIATAN



Bersama UPPKA Binaan BKKBN



Bersama Perempuan Kreatif



Bersama Ambun Suri



Bersama Lalinda Boutique

BUDAYA KEWIRAUSAHAAN
DI BUKIT TINGGI
SUMATERA BARAT



FGD bersama Organisasi Masyarakat, Tokoh Adat, LSM
di Bukit Tinggi



TERIMA
KASIH